



Judul : Sikap MKD Dinilai Tak Selesaikan Masalah
Tanggal : Rabu, 08 Juli 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DANA CSR BUMN

Sikap MKD Dinilai Tak Selesaikan Masalah

JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah klarifikasi dilakukan pimpinan DPR kepada pimpinan Komisi VII terkait dugaan permintaan sejumlah anggota DPR untuk terlibat dalam pembagian dana tanggung jawab sosial perusahaan dari sejumlah BUMN di bidang tambang, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak melakukan tindak lanjut pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etis tersebut. MKD menilai persoalan itu bukan pelanggaran etis anggota DPR.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (7/7/2020), mengatakan, pihaknya menilai tak ada kasus pelanggaran etis saat rapat Komisi VII, pekan lalu itu. Bahkan, Habiburokhman malah berencana mengusulkan MKD melayangkan surat protes kepada Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, yang dinilai tidak

etis saat rapat bersama DPR. "Memang tidak ada kasus. Saya justru akan mendorong MKD memprotes sikap Dirut Inalum (MIND ID) yang tidak beretika," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rachmat Gobel menyatakan hal senada. Pelibatan anggota DPR dalam penyerahan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN sektor tambang di masa pandemi Covid-19 untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sebagaimana diatur UUD 1945 serta Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Dengan begitu, kontribusi dari BUMN tersebut bisa berjalan baik dan tepat sasaran (*Kompas*, 7/7/2020).

Dalam rapat Komisi VII DPR dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, MIND ID, Selasa (30/6/2020), sejumlah

anggota DPR meminta dilibatkan dalam pembagian dana CSR dari BUMN. Dalam rapat tersebut bahkan terjadi pengusiran Orias Petrus Moedak oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir.

Orias, tambah Habiburokhman dinilai kerap memotong pembicaraan anggota DPR. Sikap tersebut tak seharusnya ditunjukkan mitra kerja DPR saat rapat.

Klarifikasi tak bermakna

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sikap MKD yang tidak menindaklanjuti apa yang terjadi di rapat Komisi VII DPR justru jadi masalah tersendiri. Sebab, mereka merasa pekerjaan mereka dalam melakukan penegakan etik atas kasus dugaan permintaan jatah CSR di-

anggap selesai dengan klarifikasi yang diinisiasi pimpinan DPR.

"Klarifikasi kepada pimpinan tak bermakna apa pun, apalagi dilakukan secara tertutup. Klarifikasi itu hanya untuk memperjelas persoalan, bukan menyelesaikan secara etis," ujarnya.

Benteng terakhir penuntasan masalah etis di parlemen, tambah Lucius, ada di tangan MKD. Oleh karena itu, MKD diharapkan memproses kasusnya secara tuntas.

Gun Gun Heryanto, pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menambahkan, sebagai wakil rakyat, yang dipertontonkan seharusnya argumentasi tajam berbasis data, alasan, logika, dan berorientasi pada manajemen kehormatan lembaga dan mitra kerja. (REK)